

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya, Penyusunan LAKIP Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dapat terselesaikan.

LAKIP ini disusun merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan persoalan yang di hadapi.

Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidak serasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.

Akhirnya atas bantuan semua pihak dalam proses penyusunan LAKIP kami sampaikan terima kasih.

Semoga bermanfaat.

Trenggalek, Januari 2018
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 199103 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii

BAB I.PENDAHULUAN..... 1

A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	1
C. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI.....	2
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9

BAB II.PERENCANAAN KINERJA..... 11

AVISI DAN MISI	11
B. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA	15

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
B. REALISASI ANGGARAN	33

BAB IV.PENUTUP..... 40

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA
 2. PERJANJIAN KINERJA
 3. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA
-

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu media pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek disusun secara sistematis fakta sudah melembaga di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan, program dan kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebagai suatu rangkaian untuk merealisasikan tujuan, sasaran, serta visi misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021, sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja, maka pada akhir tahun 2017 perlu disusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP 2017).

Melalui LAKIP ini akan dapat terlihat sampai sejauh mana keberhasilan, kegagalan dan persoalan yang dihadapi kedepan. Berdasarkan data yang tercermin dalam panduan kinerja kegiatan, prosentase capaian pelaksanaan program sebesar 94,98% (hasil analisis dari penyerapan dana, dana yang tersedia, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan).

Sumber dana pendukung program kegiatan dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.023.099.000,- dengan rincian sbb :

- 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.1.049.669.500,-
 - 1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.1.081.883.500,-
 - 1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 115.200.000,-
 - 1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp.140.240.000,-
 - 1.5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Rp. 185.000.000,-
 - 1.6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil : Rp. 87.440.000,-
 - 1.7 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 485.297.000,-
 - 1.8 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Rp. 355.500.000,-
 - 1.9 Program Penataan Administrasi Kependudukan : Rp. 1.522.869.000,-
-

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat dalam menyambut abad baru yang dilandasi dengan globalisasi dan teknologi informasi yang semakin canggih membuka peluang kepada siapa saja untuk berinteraksi. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh sektor-sektor organisasi publik karena masyarakat semakin kritis dalam menilai keberadaan sebuah organisasi.

Era desentralisasi yang di tandai dengan Paradigma baru dijiwai oleh semangat transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan reformasi. Perumusan perencanaan dan pengawasan yang ketat serta pertanggung jawaban kinerja yang akuntabel merupakan hal penting dan harus dilakukan oleh organisasi publik dewasa ini.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang ditetapkan, maka dalam rangka pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No.7 tahun 1999.

B. TUJUAN

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasarana bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan serta cita-cita. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, teratur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna.

Di dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah penyusunan LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

C. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

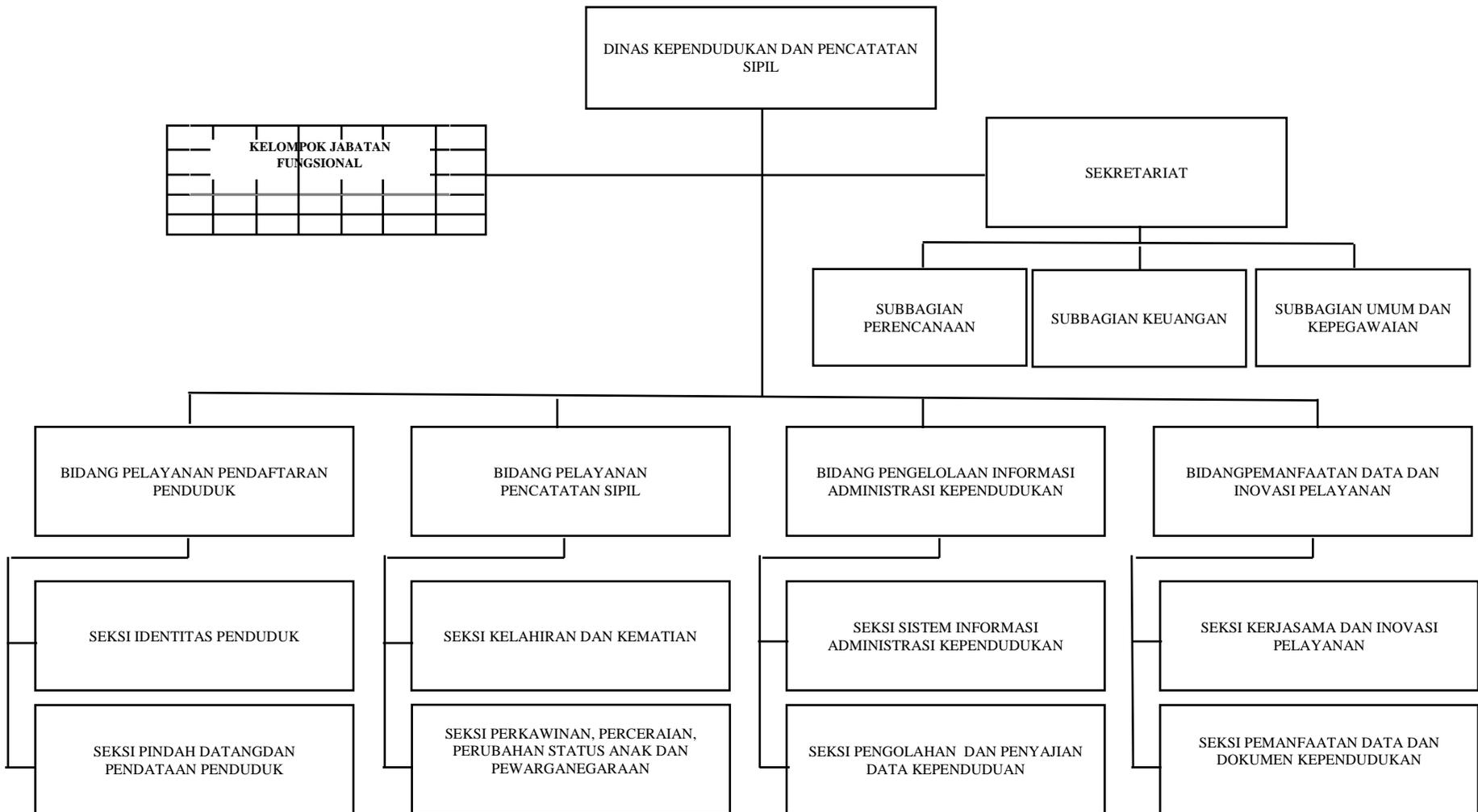
A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala
 2. Bagian Sekretariat terdiri :
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub. Bagian Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
-

- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana tabel berikut :

Tabel. I
Pejabat Struktural menurut Jabatan dan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

NO	Kategori Jabatan	JumlahPejabatStruktural,Staf dan Fungsional				Jumlah
		Golongan Kepangkatan				
		I	II	III	IV	
A.	Pejabat Struktural					
1.	Eselon II	-	-	-	1	1
2.	Eselon III	-	-	-	5	5
3.	Eselon IV	-	-	11	-	11
B.	Staf	-	18	13	-	31
C.	Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	18	24	6	48

Tabel.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

NO	Pendidikan	Struktural / Staf	Petugas Lapangan	Jumlah
1.	S 2	4	-	4
2.	S 1	24	-	24
3.	Diploma	8	-	8
4.	SLTA	12	-	12
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	48	-	48

TABEL. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Struktural / Staf	Petugas Lapangan	Total
1.	Laki - laki	30	-	30
2.	Perempuan	18	-	18
	Jumlah	48	-	48

C. Sarana dan prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menempati gedung di jalan Brigjen Soetran No. 17 Telpon : 0355. 791160 terdiri dari :

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung / Kantor	1	Layak

Sarana lain yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

No	Sarana	Baik	Rusak	Jumlah	Satuan
1	Kendaraanroda 4	6	0	6	Unit
2	Kendaraan roda 2	35	0	35	Unit
3	Komputer/notebook	35	0	35	Unit
4	Komputer PC	47	0	47	unit
5	Mesin Ketik/manual	4	0	4	unit
6	Meja	34	0	34	buah
7	Kursi	219	0	219	buah
8	Almari	26	0	26	buah
9	Filling Cabinet	19	0	19	buah
10	Mesin absensi	2	0	2	buah
11	Scaner	8	0	8	buah
12	Brankas	1	0	1	buah
13	Rak	16	0	16	buah
14	Printer Inject	42	0	42	buah
15	Printer dot matrik	15	0	15	buah

No	Sarana	Baik	Rusak	Jumlah	Satuan
16	Printer KTP-el	6	0	6	buah
17	UPS	24	0	24	unit
18	Webcam	15	0	15	unit
19	Hublan	5	0	5	unit
20	LCD Proyektor	2	0	2	unit
21	Genset	3	0	3	unit
22	Server	6	0	6	unit
23	AC	15	0	15	unit
24	Wireless	5	0	5	buah
25	Mesin Antrian	2	0	2	buah
26	Sound Sistem	1	0	1	unit
27	Mesin absensi	2	0	2	unit
28	Alat pemadam kebakaran	10	0	10	unit
29	Kipas Angin	3	0	3	unit
30	Mesin Pompa Air	2	0	2	unit
31	Kursi Tunggu	25	0	25	unit
32	Mesin Penghancur Kertas	1	0	1	unit
33	Papan Nama	1	0	1	unit
34	Tenda Lipat	2	0	2	unit
35	Card Reader	1	0	1	unit
36	Kamera	3	0	3	unit
37	Signature Pad	1	0	1	unit
38	Fingerprint Scanner	1	0	1	unit
39	Iris Scanner	1	0	1	unit
40	Tripod	3	0	3	unit
41	Modem	2	0	2	unit

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengoptimalkan masih kurang memadai meski beberapa sarana lain cukup memadai.

D. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek No. 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pembinaan UPTD;
-

- Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar dokumen perencanaan strategis organisasi dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BABIII Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BABIV Penutup.

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – lampiran -----

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

A.1. VISI

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode suatu perencanaan.

Visi sebagai cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah agar tetap eksis dan konsisten,antisipasif, inovatif serta produktif dalam menjawab pertanyaan ”What do we want to become?”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, selain pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek maka Visi Kabupaten Trenggalek yang hendak di wujudkan pada Tahun 2016-2021 adalah :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “

Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah :

MAJU berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

ADIL bertiterwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

SEJAHTERA berartiterwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

BERKEPRIBADIAN berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek; dan

IMAN DAN TAQWA berarti terwujudnyaperilaku masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

A.2. MISI

Misi yaitu merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pernyataan Misi secara eksplisit tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekaligus pernyataan menyatakan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Agar misi ini terwujud maka masukan yang konstruktif perlu diperhatikan.

Rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ;
 2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
 3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
-

4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
5. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;
6. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
7. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam halmewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berupaya untuk melaksanakan MISI I (satu) yaitu :

MENINGKATKANKINERJA BIROKRASI YANG BERSIH, KOMPETEN DAN PROFESSIONALDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.

B. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan sebagai implementasi dari penjabaran misi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, 1 sampai dengan 5 tahun merupakan kerangka prioritas yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, produktif dan professional.

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” (Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan yaitu **“Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

C. PERJANJIAN KINERJA

Kegiatan Strategis atau kegiatan Wajib yang dilaksanakan di Tahun 2017 adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dengan Sekretaris Daerah selaku atas nama Bupati, sebagai acuan untuk melaksanakan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan

tahun terdapat perubahan / pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja, maka akan dibuat penetapan kinerja Perubahan seperti di bawah ini :

Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.049.669.500
	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (74,00)	Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.049.669.500
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.081.883.500
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 448.535.000
			Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap / Penunjang Kendaraan Layanan Administrasi Kependudukan Keliling	Rp. 164.195.000
			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 312.140.000
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. 157.013.500
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 115.200.000
			Kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja Karyawan	Rp. 115.200.000
			Program Peningkatan	Rp. 140.240.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang PD	Rp. 60.240.000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan PD dan Reformasi Birokrasi	Rp. 80.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	99,6%	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 185.000.000
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (77,00)	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk	Rp. 135.000.000
	Persentase Penduduk ber KTP-el	88%	Kegiatan Pelayanan Pendataan Penduduk	Rp. 50.000.000
	Persentase Kepemilikan KK	85%	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 87.440.000
	Persentase Penduduk usia 0-18 th yang ber akte kelahiran	85%	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Rp. 57.940.000
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	40%	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Rp. 29.500.000
	Persentase penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 485.297.000
	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	96,2%	Kegiatan Pengendalian SIAK dan Jaringan	Rp. 88.000.000
	Persentase lembaga yang memanfaatkan Data kependudukan	100%	Kegiatan Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 147.297.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
	Persentase digitalisasi dokumen kependudukan	7%	Kegiatan Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan	Rp. 250.000.000
	Persentase inovasi pelayanan	100%	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Rp. 355.500.000
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Rp. 25.000.000
			Kegiatan Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 68.000.000
			Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi ISO	Rp. 37.500.000
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatatan Sipil Keliling	Rp. 225.000.000
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.522.869.000
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.522.869.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Capaian kinerja di tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Sasaran : 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator :

- Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti dengan formula hitungan (Jumlah temuan BPK tahun berkenaan yang ditindak lanjuti/Jumlah temuan BPK tahun berkenaan) x 100 %
- Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat merupakan jumlah Nilai SAKIP dari Inspektorat

2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan, dengan indikator

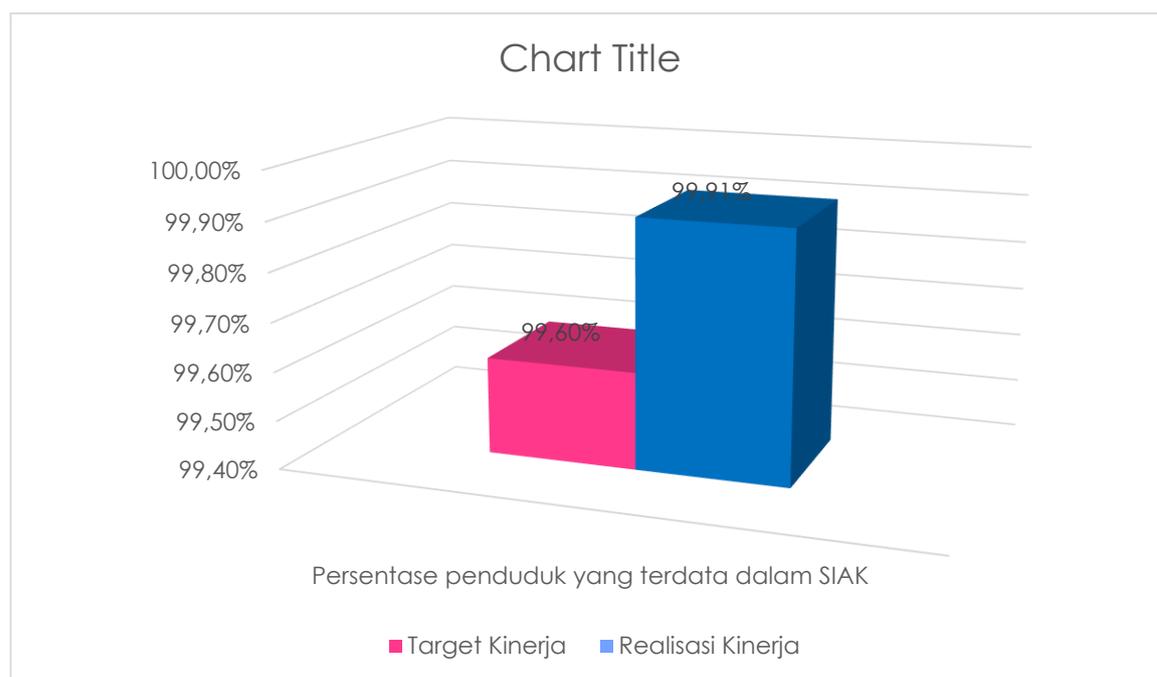
- Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK dengan formula hitungan (Jumlah Penduduk yang terdata dalam SIAK/Jumlah Penduduk secara keseluruhan) X 100 %
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan Nilai angka Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya untuk capaian kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tahun 2017 ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

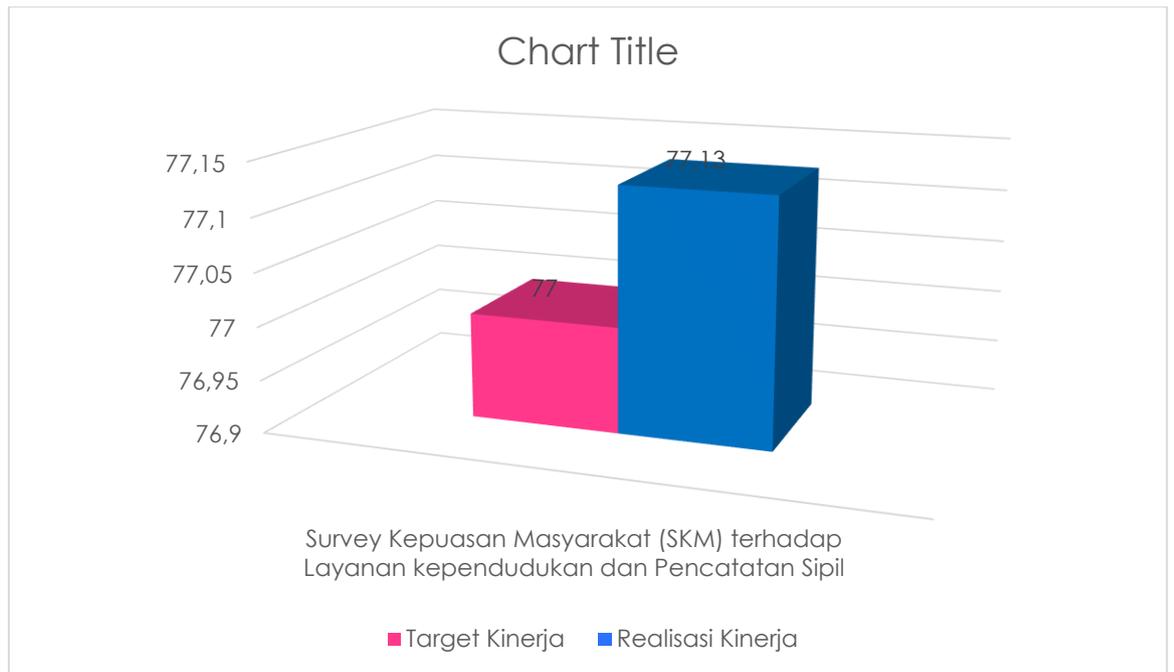
Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	100%	Belum ada pemeriksaan	-
	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (70,00)	Belum ada evaluasi	-
Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	99,6%	99,91%	100,31%
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (77,00)	B (77,13)	100,17%



Realisasi Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK di Tahun 2017 sebesar 99,91% dengan rincian Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK sejumlah 761.730 Orang dan jumlah penduduk seluruhnya sejumlah 762.417 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK sebesar 100,31% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,6%.



Selama tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk realisasi dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mendapat nilai B (77,13). Capaian realisasi kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 100,17% sudah melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar B (77,00).

Di tahun 2017 merupakan tahun kedua untuk RPJMD 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-
		Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (85,00)	B (61,00)	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP-el		90,16%	-	-
		Rasio Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber Akta Kelahiran		81,75%	-	-
		Rasio Penerbitan Akta Kematian		61,39%	-	-
		Rasio percepatan penyelesaian KTP, KK dan Akta Kelahiran dalam satu hari		19,60%	-	-
		Rasio Validitas Data Penduduk		96%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat		B (76,27)	-	-
		Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	100%	-	99,95%	-
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (82,00)	-	B (77,13)	-

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode

Sasaran	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	100%	Belum ada pemeriksaan	-
	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (85,00)	Belum ada evaluasi	-
Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	100%	99,91%	99,95%
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (82,00)	B (77,13)	94,06%

Tabel 3.4
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Anggaran %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	2.386.993.000	47,5%
	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat		
Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	2.636.106.000	52,5%
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Tujuan serta Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja :

Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja

Persentase nilai asset dalam kondisi baik

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap/Penunjang Kendaraan Layanan Administrasi Kependudukan Keliling

c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja

Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja : Persentase Dokumen Laporan yang diselesaikan tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah;

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi.
 5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja : Persentase Penduduk ber KTP *dan* Persentase Kepemilikan KK
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk
 - b. Pelayanan Pendataan Penduduk
 6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja : Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang ber akta kelahiran, persentase penerbitan akta kematian serta persentase akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pencatatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - b. Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan
 7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pengendalian SIAK dan Jaringan
 - b. Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Peningkatan /Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan
 8. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan indikator kinerja : Persentase lembaga yang memanfaatkan data, persentase inovasi pelayanan dan persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK
Kegiatan yang dilaksanakan :
-

- a. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
 - b. Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Pendampingan dan Sertifikasi ISO
 - d. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling
9. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Jenis/Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adapun Pencapaian Kinerja Program /Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	100%	Belum ada pemeriks aan	-	2.386.993.000	2.258.259.688	94,60%
	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (70,00)	Belum ada evaluasi				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.049.669.500	1.029.675.413	98,10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Nilai Asset dalam Kondisi Baik	100%	89,97%	89,97%	1.081.883.500	973.336.775	89,97%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	140.240.000	140.227.500	99,99%
Program Peningkatan Kapasitas	Persentase Aparatur yang telah mengikuti	100%	100%	100%	115.200.000	115.020.000	99,84%

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sumber Daya Aparatur	Bimtek/Diklat						
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	99,6%	99,91%	100,31%	2.636.106.000	2.512.745.712	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (77,00)	B (77,13)	100,17%			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	1.522.869.000	1.427.035.956	93,71%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber KTP-el	88%	91,40%	103,86%	185.000.000	174.100.200	94,11%
	Persentase Kepemilikan KK	85%	99,83%	117,45%			
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk usia 0-18 th yang berakte kelahiran	85%	86,92%	102,26%	57.940.000	57.357.500	98,99%
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	40%	54,61%	136,53%			
	Persentase penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	100%	100%	100,00%	29.500.000	29.442.370	99,80%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	96,2%	96,51%	100,32%	485.297.000	475.123.500	97,90%
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase lembaga yang memanfaatkan Data kependudukan	100%	100%	100,00%	355.500.000	349.686.186	98,36%
	Persentase digitalisasi dokumen kependudukan	7%	7%	100,00%			
	Persentase inovasi pelayanan	100%	100%	100,00%			

Tabel 3.6
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti	-	94,60%	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	-		-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	100,31%	93,71%	6,6%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,17%		6,46%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber KTP-el	103,86%	94,11%	9,75%
	Persentase Kepemilikan KK	117,45%		23,34%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk usia 0-18 th yang ber akte kelahiran	102,26%	98,99%	3,27%
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	136,53%		37,54%
	Persentase penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	100,00%	99,80%	0,2%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	100,32%	97,90%	2,42%
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase lembaga yang memanfaatkan Data kependudukan	100,00%	98,36%	1,64%
	Persentase digitalisasi dokumen kependudukan	100,00%		1,64%
	Persentase inovasi pelayanan	100,00%		1,64%

Rincian Tabel Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

Realisasi Persentase Penduduk ber KTP-el di Tahun 2017 sebesar 91,40% dengan rincian Jumlah Penduduk ber KTP-el sejumlah 546.183 Orang dan Jumlah Penduduk Wajib KTP-el sejumlah 597.555 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penduduk ber KTP-el sebesar 103,86% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 88%.

Realisasi Persentase Kepemilikan KK di Tahun 2017 sebesar 99,83% dengan rincian Jumlah KK yang diterbitkan sejumlah 61.818Orang, jumlah tersebut sama dengan jumlah permohonan KK yg memenuhi syarat sejumlah 61.818Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Kepemilikan KK sebesar 100%.

Realisasi Persentase Penduduk usia 0-18 th yang ber akte kelahiran di Tahun 2017 sebesar 86,92% dengan rincian Jumlah Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran sejumlah 161.972 Orang dan Jumlah Penduduk Usia 0-18 tahun sejumlah 186.337 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penduduk usia 0-18 th yang ber akte kelahiran sebesar 102,26% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 85%.

Realisasi Persentase Penerbitan Akta Kematian di Tahun 2017 sebesar 54,61% dengan rincian Jumlah Akta Kematian yg diterbitkan sejumlah 11.391Orang dan Jumlah Kematian yg dilaporkan pada tahun berkenaan sejumlah 20.859Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penerbitan Akta Kematian sebesar 136,53% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 40%.

Realisasi Persentase penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Tahun 2017 sebesar 100% dengan rincian Jumlah Akta

perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan sejumlah 59Orang dan Jumlah Penduduk yang melaksanakan perkawinan, perceraian, perub.status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan sejumlah 59Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sebesar 100% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan di Tahun 2017 sebesar 96,51% dengan rincian Jumlah Penduduk Data Konsolidasi Bersih (DKB) sejumlah 736.629Orang dan Jumlah Penduduk Seluruhnya sejumlah 763.275Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan sebesar 100,32% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 96,2%.

Realisasi Persentase lembaga yang memanfaatkan Data kependudukan di Tahun 2017 sebesar 100% dengan rincian jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakansejumlah 4 lembaga dan Jumlah Lembaga yg di rencanakan mengadakan PKS sejumlah 4 lembaga. Maka capaian realisasi kinerja Persentase lembaga yang memanfaatkan Data kependudukan sebesar 100% sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Berikut lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan antara lain : PKS dengan Inspektorat, PKS dengan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, PKS dengan Dinas SosP3A dan PKS dengan Bagian Pemerintahan Umum

Realisasi Persentase digitalisasi dokumen kependudukan di Tahun 2017 sebesar 7% dengan rincian Jumlah Dokumen kependudukan SIAK yg didigitalisasejumlah 5.910 Dokumen dan Jumlah Dokumen SIAK seluruhnya sejumlah 84.348 Dokumen.

Maka capaian realisasi kinerja Persentase digitalisasi dokumen kependudukan sebesar 100% sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 7%.

Realisasi Persentase inovasi pelayanan di Tahun 2017 sebesar 100% dengan rincian Jumlah Dokumen kependudukan SIAK yg didigitalisasisejumlah 4 inovasi dan Jumlah Dokumen SIAK seluruhnya sejumlah 4 inovasi. Maka capaian realisasi kinerja Persentase inovasi pelayanan sebesar 100% sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Inovasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek antara lain layanan cepat adminduk, sambungan online desa, penghapusan data kematian dan SMS Gateway.

Realisasi Persentase inovasi pelayanan di Tahun 2017 sebesar 100% dengan rincian Jumlah Dokumen kependudukan SIAK yg didigitalisasisejumlah 4 inovasi dan Jumlah Dokumen SIAK seluruhnya sejumlah 4 inovasi. Maka capaian realisasi kinerja Persentase inovasi pelayanan sebesar 100% sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Inovasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek antara lain layanan cepat adminduk, sambungan online desa, penghapusan data kematian dan SMS Gateway.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek maka dapat dilihat tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2017. Adapun secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mampu menyerap 94,98% dari seluruh dana yang dianggarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya cukup baik, namun ada sedikit permasalahan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantormengalami hambatan dan permasalahan pada pengadaan Peralatan IT berupa NAS dan card reader online tidak bisa terlaksana karena kesulitan mencari spesifikasi barang yang sesuai standart Kemendagri. Solusi kedepan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebutuhan barang dimaksud.

Berikut Perincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaiannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**REALISASI ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.023.099.000	4.771.005.400	94,98%	252.093.600
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.049.669.500	1.029.675.413	98,10%	19.994.087

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.049.669.500	1.029.675.413	98,10%	19.994.087
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.081.883.500	973.336.775	89,97%	108.546.725
2.06.2.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	448.535.000	448.325.000	99,95%	210.000
2.06.2.06.01.02.12	Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap / Penunjang Kendaraan Layanan Administrasi Kependudukan Keliling	164.195.000	149.680.000	91,16%	14.515.000
2.06.2.06.01.02.18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.140.000	218.772.000	70,09%	93.368.000
2.06.2.06.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	157.013.500	156.559.775	99,71%	453.725
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.200.000	115.020.000	99,84%	180.000
2.06.2.06.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.200.000	115.020.000	99,84%	180.000
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	140.240.000	140.227.500	99,99%	12.500

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2.06.2.06.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	60.240.000	60.240.000	100,00%	0
2.06.2.06.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	80.000.000	79.987.500	99,98%	12.500
2.06.2.06.01.15	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	185.000.000	174.100.200	94,11%	10.899.800
2.06.2.06.01.15.01	Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk	135.000.000	128.844.600	95,44%	6.155.400
2.06.2.06.01.15.02	Pelayanan Pendataan Penduduk	50.000.000	45.255.600	90,51%	4.744.400
2.06.2.06.01.16	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	87.440.000	86.799.870	99,27%	640.130
2.06.2.06.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	57.940.000	57.357.500	98,99%	582.500
2.06.2.06.01.16.02	Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	29.500.000	29.442.370	99,80%	57.630
2.06.2.06.01.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	485.297.000	475.123.500	97,90%	10.173.500
2.06.2.06.01.17.01	Pengendalian SIAK dan Jaringan	88.000.000	87.869.500	99,85%	130.500
2.06.2.06.01.17.02	Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	147.297.000	141.245.000	95,89%	6.052.000

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2.06.2.06.01.17.03	Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan	250.000.000	246.009.000	98,40%	3.991.000
2.06.2.06.01.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	355.500.000	349.686.186	98,36%	5.813.814
2.06.2.06.01.18.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	25.000.000	23.390.020	93,56%	1.609.980
2.06.2.06.01.18.02	Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.000.000	66.020.000	97,09%	1.980.000
2.06.2.06.01.18.03	Pendampingan dan Sertifikasi ISO	37.500.000	36.764.700	98,04%	735.300
2.06.2.06.01.18.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta- akta Pencatatan Sipil Keliling	225.000.000	223.511.466	99,34%	1.488.534
2.06.2.06.01.19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.522.869.000	1.427.035.956	93,71%	95.833.044
2.06.2.06.01.19.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.522.869.000	1.427.035.956	93,71%	95.833.044

Berikut ini adalah uraian dari masing – masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Dana yang tersedia : Rp.1.049.669.500,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 1.029.675.413,-

Sisa Dana : Rp. 19.994.087,-

Prosentase : 98,10%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 98,10% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi menyediakan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Dana yang tersedia : Rp. 1.081.883.500,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 973.336.775,-

Sisa Dana : Rp.108.546.725,-

Prosentase : 89,97%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 89,97%, terdapat kendala seperti yang tersebut diatas bahwa di Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami hambatan dan permasalahan pada pengadaan Peralatan IT berupa NAS dan card reader online tidak bisa terlaksana karena kesulitan mencari spesifikasi barang yang sesuai standart Kemendagri. Solusi kedepan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebutuhan barang dimaksud.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dana yang tersedia : Rp. 115.200.000,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 115.020.000,-

Sisa Dana : Rp. 180.000,-

Prosentase : 99,84%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,84% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dana yang tersedia : Rp. 140.240.000,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 140.227.500,-

Sisa Dana : Rp. 12.500,-

Persentase : 98,15%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 98,15% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dan keuangan dalam membuat pelaporan.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dana yang tersedia : Rp. 1.522.869.000,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek/DAK

Realisasi : Rp. 1.427.035.956,-

Sisa Dana : Rp. 95.833.044,-

Persentase : 93,71%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 93,71% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu lebih optimal dalam meningkatkan kegiatan – kegiatan dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya LAKIP Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki terkait kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

- Kinerja keuangan dan barang : bahwa pencapaian target dan realisasi pada semua kegiatan terdapat mekanisme pencatatan keuangan dan barang, maka perlu ditingkatkan
 - Kinerja pelayanan : bahwa dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan Standard Operasi Prosedur, namun masih perlu peningkatan.
 - Tempat pelayanan : Dengan bertempat di gedung baru serta penambahan 1 unit mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling sebagai sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu
-

meningkatkan cakupan-cakupan program serta sasaran kinerja dari target yang telah rencanakan. Namun demikian dengan keterbatasan SDM yang tersedia karena pelayanan terbagi di beberapa tempat yaitu di Dinas serta di dua tempat lain (Kecamatan/Desa) dengan menggunakan mobil pelayanan keliling maka menjadikan pelayanan kurang maksimal.

- Sosialisasi tatap muka maupun melalui media perlu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat lebih mengetahui terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Dengan tersusunnya LAKIP sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja di harapkan dapat menjadikan acuan bagi penyusunan rancangan program kedepan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masa mendatang.

Serta perlu dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih teknis, masukan saran, dan kritik untuk menyempurnakan laporan kinerja ini masih sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian kerjasama yang baik serta bantuan yang diberikan dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Trenggalek, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 199103 1 003
